

# **Misteri Perompakan di Perairan Benin sebagai Bentuk Perlawanan Marginalisasi Dekolonisasi Dahomey**

**Agnes Monica P.K Simanungkalit**  
*Universitas Diponegoro*

## **Abstrak**

*Perompakan di perairan Benin telah menjadi isu signifikan dalam diskursus keamanan maritim dan ekonomi global. Penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena perompakan di perairan Benin melalui perspektif poskolonialisme, dengan fokus pada dampak warisan kolonial dan marginalisasi ekonomi terhadap munculnya aktivitas perompakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis studi literatur, mengandalkan analisis historis dan ekonomi untuk menggali faktor-faktor penyebab struktural di balik perompakan. Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa perompakan di Benin dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan struktural yang diwariskan dari sejarah kolonial dan proses dekolonisasi yang tidak tuntas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perompakan di Benin bukan sekadar masalah kriminalitas, melainkan refleksi dari perlawanan terhadap marginalisasi dan eksploitasi ekonomi yang mendalam. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang perompakan maritim di Benin serta menawarkan wawasan bagi kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** *Perompakan, Benin, Poskolonialisme, Marginalisasi, Dekolonisasi.*

## **Abstract**

*Piracy in the waters of Benin has become a significant issue in maritime security and global economic discourse. This study aims to examine the phenomenon of piracy in Benin's waters through a postcolonial perspective, focusing on the impact of colonial legacies and economic marginalization on the emergence of piracy activities. This research employs a qualitative method with a descriptive analytical approach desk research, relying on historical and economic analysis to explore the structural factors behind piracy. The findings of this study indicate that piracy in Benin can be understood as a form of resistance against structural injustices inherited from colonial history and an incomplete decolonization process. This research concludes that piracy in Benin is not merely a matter of criminality but a reflection of resistance against deep-seated economic marginalization and exploitation. This study contributes to providing a more holistic understanding of maritime piracy in Benin and offers insights for more equitable and sustainable policy-making.*

**Keywords:** *Piracy, Benin, Postcolonialism, Marginalization, Decolonization.*

## Pendahuluan

Perompakan di perairan Benin merupakan fenomena yang sering tersingkirkan dari catatan kejahatan maritim dunia. Seringkali pembahasan yang terjadi seputar *blue crime* yang terjadi di Teluk Guinea terpusat di Somalia, sehingga membuat urgensi kejahatan *blue crime* di kawasan laut Afrika lainnya hanya sebatas bayang-bayang yang seharusnya mendapatkan panggung perhatian lebih akibat urgensinya yang sebenarnya menjadi akar permasalahan utama dari indikasi jenis kejahatan ini. Akar dari perompakan sejatinya berasal dari kontradiksi kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi serta dekonstruksi perspektif politik suatu negara yang tidak sesuai dengan kapasitas kebutuhan mendasar masyarakat (Bueger dan Edmunds 2024). Dan hal ini ditemukan sebagai landasan berbagai kejahatan menyangkut *blue crime* di berbagai kawasan perairan dunia yang dikuasai oleh kelompok militan dan masyarakat termarginalisasi.

Teluk Guinea memang terkenal dengan perannya yang amat penting sebagai jalur penghubung negara kawasan Afrika bahkan menjadi jalur perdagangan internasional. Pangsa pasar ekspor impor dunia cukup bergantung pada kawasan perairan ini, mulai dari jalur utama *Evergreen* si kapal pengangkut barang terbesar dunia dan banyaknya kapal minyak melintasi perairan Teluk Guinea. Namun, Teluk Guinea ini juga merupakan "*world piracy hotspot*" dimana aktivitas perompakan merajalela di samping kesibukan jalur perdagangannya. Jalur tersebut yang mencakup Somalia, Benin dan negara Afrika lainnya dan di perairan Benin sendiri, ditemukan banyak kasus perompakan yang menyangkut warga sipil sebagai pelaku. Mereka melakukan penyerangan dalam bentuk kelompok terhadap kapal-kapal pengangkut barang dan minyak dengan penjarahan skala kecil.

**Gambar 1. Peta Teluk Guinea**



Perompakan di Benin sendiri cukup berbeda dengan perompakan di kawasan lain. Dengan penjarahan skala kecil dan sorotan tindakan mereka cenderung menargetkan penculikan awak kapal namun tidak dijadikan sebagai sandera (Colombant 2012).

Tentu hal ini menjadi sebuah keresahan yang baru, karena para perompak ini tidak lagi menargetkan keuntungan ekonomi namun mengancam keselamatan awak kapal. Sepanjang tahun 2011-2018 peningkatan perompakan di Benin cukup stagnan (United Nations Office on Drugs and Crime 2013) namun untuk laporan hingga tahun 2019 masih ramai pemberitaan penculikan awak kapal seperti kasus penjarahan kapal *M.V Bonita* milik J.J Uglund Norwegia pada 3 November 2019 (*Pirates Kidnap Nine From Norwegian Ship off Benin* 2019).

**Tabel 1. Data Perompakan Kapal di Afrika Periode  
Perhitungan 2018-2020**

Type of Attack	Jan-Aug 2018	Jan-Aug 2019	Jan-Aug 2020
Attempted incidents	14	8	7
Suspicious approaches	4	5	14
Boarding	31	11	15
Thefts	9	11	14
Kidnappings	9	17	18
Fire upon incidents	6	9	7
Shipjackings	3	1	2
Armed robberies	10	20	4
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>82</b>	<b>81</b>

Dalam buku Bueger dan Edmunds (2024) ada penekanan pemahaman teori realis mengenai keamanan maritim yang diartikulasikan sebagai kekuatan laut, kecakapan armada militer maritim sebagai penunjang keamanan laut dunia. Mereka mendefinisikan tatanan keamanan maritim sebagai ajang unjuk kekuatan militer, sehingga mengabaikan perlunya strategi *bottom-up* atau pengendalian kausalitas tindakan pendekatan militer. Hasil temuan karya ini juga menyerukan bahwa regulasi teknis militer akan lebih besar berdampak pada perompakan yang terjadi di dunia. Pernyataan ini memang benar, dimana posisi keamanan maritim merupakan cakupan yang sangat luas dan memerlukan strategi militer angkatan bersenjata dengan prinsip kpatuhan negara, namun realisasinya akan tidak efektif. (Bueger dan Edmunds 2024).

Berbeda dengan pandangan Frederick Boamah (2023) yang secara menyeluruh membahas peran Dewan Keamanan PBB dan kegiatan mereka dalam memerangi dan memberantas pembajakan di Teluk Guinea menyatakan bahwa PBB menggambarkan perompakan di kawasan ini adalah kejahatan terhadap perdamaian. Sehingga pendekatan yang dipakai adalah pendekatan militerisasi dengan pengembangan pendekatan baru yang bersifat non kinetik. Penelitian ini berpolarisasi pada pendekatan liberalisme klasik sehingga berfokus pada pemeriksaan status perompakan berdasarkan rezim dan struktur hukum internasional. Temuan penelitian ini secara garis besar menelaah diskursif PBB terhadap Resolusi DK PBB 2634 dan fokus kegagalan konsorsium dalam menanggulangi perompakan di Teluk Guinea secara keseluruhan (Boamah 2023).

Dalam karya Gouchola (Gouchola dan Benin Army 2013) berpolarisasi pada strategi implikasi perompakan di kawasan laut teritorial Benin, dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam yang tidak dapat dimanfaatkan akibat ketertinggalan kemampuan militer yang tidak memadai memperburuk kondisi perompakan di Benin, dan permintaan tolong untuk bantuan dari negara kapabel terus ditolak (Gouchola dan Benin Army 2013). Hal serupa didukung oleh Houekpoheha et.al., (2015) yang membahas kurangnya kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam mengolah zona energi tinggi di pesisir Benin akibat ketertinggalan pengetahuan dan liabilitas yang sangat terbatas pasca kemerdekaannya (Houekpoheha et al 2015).

Berdasarkan korelasi dan hasil temuan penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan belum adanya tinjauan yang mengarah pada akar permasalahan dan pendekatan masyarakat baik secara implisit maupun eksplisit. Maka dari itu, telah ditemukan celah yang menarik berdasarkan penelitian terdahulu tersebut yang menyatakan ketidakmampuan dan ketertinggalan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan ketidakmampuan militer pasca kemerdekaan yang mana posisinya Benin merupakan negara hasil dekolonisasi atau berhasil bebas dari kolonialisme. Didukung dengan pelaporan terkini yang menyatakan tindakan mereka ini cukup kontradiktif karena penculikan hanya dilakukan pada pelaut atau awak kapal dengan kulit terang.

Berdasarkan seluruh tinjauan ini, menimbulkan sebuah pertanyaan faktor-faktor apa yang menjadi pemicu utama yang mendorong individu atau kelompok di Benin terlibat dalam aktivitas perompakan dan keterkaitannya dengan dekolonisasi. Peneliti sendiri berargumen bahwa perompakan ini memiliki akar permasalahan yang mencakup marginalisasi masyarakat Afrika terutama Benin yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan negara lain dalam berkembang, sehingga memberikan eksistensi tertutup dan keraguan beregulasi dengan negara-negara lain yang tutup mata akan tantangan internasional yang mereka hadapi.

Selain itu posisi sifat tertutup yang dimiliki oleh Benin dipengaruhi oleh dekolonisasi yang memaksa mereka untuk “membenci” dan bersifat rasis terhadap sub ras tertentu dan mencoba memberontak atas ketidakmampuan ini dengan cara menjarah dan menculik para awak kapal yang mereka indikasikan sebagai kapal milik negara Eropa. Keterbatasan serta sisa penyiksaan yang ditinggalkan pihak kolonial terutama penjajah Prancis di daratan Afrika dan keinginan untuk menguasai kembali perdagangan di Pelabuhan Cotonou yang sangat ramai di era kerajaan Dahomey mendorong pemberontakan yang dianggap sebagai kriminalitas ini.

Sejatinya telah banyak kasus yang ditimbulkan oleh dekolonisasi bangsa Eropa yang mendapat kecaman di dunia. Mulai dari penetapan stigma budak bagi ras berkulit hitam yang melahirkan gerakan protes “*Black Lives Matter*”, negara-negara yang tidak memiliki pemerintahan sendiri sehingga harus menikmati posisi menjadi negara perifer yang seringkali ada dalam kondisi kurang menguntungkan, hingga teritorial kepulauan di kawasan Afrika terutama di Pasifik dan Karibia yang masih berada dalam posisi di bawah administrasi negara kolonial seperti Prancis, Britania Raya dan Amerika Serikat. Tak hanya terbatas pada persoalan administrasi, tetapi dekolonisasi juga menyisakan krisis identitas bagi negara terjajah. Perebutan warisan budaya yang sering kali muncul akibat identitas ekonomi global, sistem pendidikan dan bahasa yang sudah dikuasai oleh negara koloni Barat, hingga saat ini.

Maka dari itu, penelitian ini menggunakan pendekatan teori poskolonialisme yang akan membantu peneliti dalam memahami faktor pemicu perompakan pasca peninggalan kolonialisme di Benin. Dengan melakukan penelitian dengan metode kualitatif dan *desk research* membantu peneliti dalam mendalami pemahaman urgensi usungan penelitian ini. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menyoroti dan meninjau warisan kolonial mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial sehingga memperkuat motif perompakan sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan yang mereka hadapi.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan untuk merampungkan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami konteks spesifik perompakan di perairan Benin. Penelitian kualitatif akan memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena perompakan di Benin dari perspektif sosial, budaya, dan politik, sejalan dengan definisi metode kualitatif sebagai jenis metode yang mengeksplorasi serta memahami makna dan persepsi sosial yang menimbulkan sebuah ketimpangan dan fenomena sosial (Creswell dan Creswell 2018). Menurut Creswell dan Creswell (2018) ada empat pilar utama dalam penelitian kualitatif, yaitu naratif, fenomenologi, teori yang beralasan pada data dan studi kasus, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berbasis studi kasus. Dimana pendekatan kualitatif berbasis studi kasus tentang perompakan di perairan Benin akan menjelaskan polemik dekolonisasi masyarakat kawasan Afrika melalui tindakan yang diklaim sebagai bentuk tindakan kriminalitas.

Selain itu metode ini akan didukung dengan metode *desk research* yang merupakan bentuk analisis konten sekunder berupa dokumen resmi, laporan berita, literatur akademis yang terkait untuk melacak narasi dan persepsi terhadap perompakan di Benin. Pendekatan ini berfokus pada interpretasi dan pemahaman mendalam tentang konteks dan narasi yang melingkupi perompakan sebagai bentuk perlawanan terhadap marginalisasi. Menggunakan desain studi kasus untuk mengeksplorasi fenomena perompakan di perairan Benin dalam konteks yang spesifik dan mendalam. Studi kasus akan memungkinkan analisis yang komprehensif tentang bagaimana perompakan dipandang sebagai perlawanan terhadap marginalisasi dan dekolonisasi. Dalam posisi ini fenomena marginalisasi dan dekolonisasi menjadi sebuah fenomena dan berperan sebagai ‘obyek’ hasil pengalaman manusia (Creswell dan Creswell 2018).

## **Landasan Teoritis dan Konseptual**

### **Poskolonialisme**

Teori poskolonialisme merupakan seperangkat teori yang berkembang dalam bidang politik dan filsafat bahkan hubungan internasional yang mengkaji legalitas budaya yang terkait praktik-praktik sosial dan material peninggalan kolonialisme. Teori ini banyak berisi kritik terhadap dominasi Barat yang orientalis memandang dan merepresentasikan Timur sebagai daerah “jajahan”. Pemikir utama kajian teori poskolonialisme adalah Frantz Fanon (1963) yang berfokus pada bagaimana kolonialisme berdampak pada psikologi dan identitas individu yang terjajah, serta bagaimana proses dekolonisasi dapat terjadi. Fanon berargumen bahwa kolonialisme menciptakan kompleks inferioritas pada orang-orang terjajah melalui berbagai mekanisme kekuasaan, budaya, dan rasial.

Dalam karyanya, “*The Wretched of the Earth*” (1963), Fanon menyatakan bahwa kekerasan adalah alat yang diperlukan untuk dekolonisasi, Fanon melihat kekerasan sebagai cara untuk memulihkan martabat dan identitas orang-orang yang terjajah, serta untuk membongkar struktur kolonial yang opresif. Menurut Fanon, hanya melalui tindakan revolusioner yang radikal, masyarakat terjajah dapat benar-benar membebaskan diri mereka. Fanon juga menyoroti proses internalisasi kolonialisme di mana masyarakat terjajah mulai melihat diri mereka sendiri melalui lensa kolonial, yang menyebabkan alienasi dari budaya dan identitas asli mereka. Pentingnya pemulihan identitas budaya sebagai bagian dari proses dekolonisasi, Fanon mengkritik bagaimana kolonialisme tidak hanya mengontrol aspek ekonomi dan politik dari kehidupan terjajah, tetapi juga aspek budaya

dan dekolonisasi sebagai proses yang tidak hanya memerlukan perubahan struktural, tetapi juga perubahan radikal dalam cara berpikir dan melihat dunia.

Dalam karyanya yang lain yaitu "*Black Skin, White Mask*" (2007) Fanon kembali mengeksplorasi bagaimana orang-orang kulit hitam menginternalisasi standar kecantikan, budaya dan nilai-nilai orang berkulit putih yang menebarkan perasaan rendah diri atau *insecurities* akibat terbiasa dijadikan budak yang menjadi konflik identitas. Sehingga tak jarang masyarakat ras kulit gelap cenderung merasa harus melakukan pemberontakan atas ketidakadilan yang mereka dapatkan (Fanon 2007).

Disisi lain, Gayatri Chakravorty Spivak (2010) menggunakan istilah "*subaltern*" untuk merujuk pada kelompok-kelompok yang berada di bawah struktur kekuasaan kolonial berkulit putih dan tidak memiliki akses ke alat-alat representasi. Spivak menyoroti bagaimana suara *subaltern* yang berkulit lebih gelap seringkali dibungkam atau diabaikan dalam narasi-narasi dominan. Spivak menggunakan metode dekonstruksi untuk mengkritisi teks-teks kolonial dan pascakolonial, menunjukkan bagaimana mereka sering kali gagal mewakili pengalaman bekas jajahan mereka dan cenderung menyingkirkan kelompok jajahan sebagai masyarakat marginal terbuang (Morris 2010).

Sejatinya kritik budaya kolonialisme sudah sejak dahulu disampaikan, salah satunya oleh Ngũgĩ wa Thiong'o dalam bukunya "*Decolonising The Mind*" (1986) mengkritik penyebaran dan pemaksaan penggunaan bahasa penjajah kolonial harus dihapuskan, dan membiarkan bahasa asli kelompok terjajah tetap digunakan sebagai bahasa asli yang seharusnya menjadi identitas utama mereka (wa Thiong'o 1986). Sebagai orang Kenya yang dijajah dan dipaksa menggunakan bahasa penjajah membuat wa Thiong'o merepresentasikan pentingnya pemulihan budaya yang terkikis pasca kolonialisme, sehingga mendukung para kelompok terjajah untuk terus maju melakukan kebebasan mengeksplorasi budayanya sendiri.

Berdasarkan seluruh pemikiran tersebut, teori poskolonialisme menawarkan lensa yang menarik untuk memahami misteri perompakan di Benin sebagai bentuk pemberontakan akibat terkikisnya identitas dan budaya mereka selama terjadinya penjajahan oleh kolonial dan sebagai bentuk protes masyarakat akibat bentuk marginalisasi perekonomian global yang sangat nyata. Karena menurut teori ini, perompakan bukan sebatas kriminalitas, melainkan konsekuensi kompleks dari warisan kolonialisme dan eksploitasi yang telah didapatkan masyarakat Benin sejak lama. Sehingga membuat polemik bahasan kriminalitas yang berkaitan dengan identitas dan penegasan identitas lokal Benin cukup unik untuk diteliti lebih lanjut, dan direpresentasikan melalui pemikiran poskolonialisme.



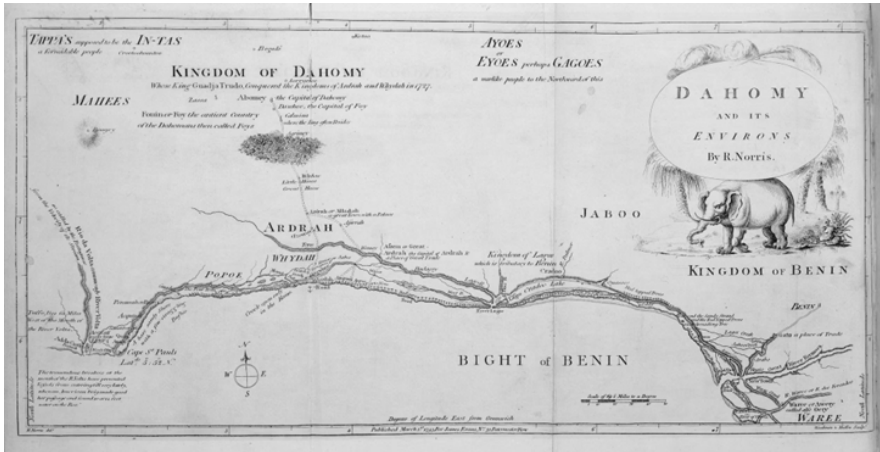
## Hasil dan Diskusi

### Rangkaian Sejarah Marginalisasi Dekolonisasi Era Dahomey

Benin dahulunya merupakan sebuah kerajaan yang dikenal dengan Dahomey yang terkenal kaya dengan sentral perdagangan yang ramai. Awalnya negara Eropa seperti Belgia, Prancis, Portugal dan Inggris telah lama menjalin hubungan perdagangan yang menawarkan akses sumberdaya seperti lada, gading gajah bahkan perdagangan budak miskin (McGonnell dan Collins 2021). Namun hal ini menjadi ketimpangan yang kontras dengan kerajaan di belahan Afrika lain yang sedang dalam kondisi terjajah, sehingga membuat negara Eropa merancang Konferensi Berlin pada 1884 dengan tujuan membagi bagian Afrika untuk dijajah dengan merata dan dikuasai yang disebut dengan "*Scramble for Africa*" yaitu titik yang menandai dimulainya Era Imperialisme dan invasi negara-negara Afrika secara keseluruhan (Adotevi et al. 2024).

Benin sejak saat itu berjuang untuk mempertahankan perdagangan dan posisi kerajaan Dahomey di wilayah Afrika Barat, melawan Inggris yang berhasil mengakuisisi kepercayaan masyarakat pesisir dengan perjanjian perdagangan katalis. Akibat adanya perbedaan tujuan, terjadilah perang saudara yang memberikan celah bagi Prancis pada 1894 dan menggulingkan kerajaan Dahomey serta membuat kejayaan dan budaya yang telah mereka anut terkikis oleh perbudakan yang dilakukan oleh Prancis. Rakyat Dahomey mengalami eksploitasi dan marginalisasi di bawah jajahan Prancis, segala sumber daya baik alam maupun manusia dieksploitasi semena-mena, hingga timbullah gerakan perlawanan nasionalis di Dahomey yang menuntut kemerdekaan dan kedaulatan (McGonnell dan Collins 2021).

## Gambar 2. Peta Kerajaan Dahomey



Perdagangan budak yang menjadi transaksi wajib Dahomey dulu kepada bangsa kolonial seperti Prancis, Inggris dan Portugis membuat keresahan bagi masyarakat terutama perempuan di kerajaan tersebut (Jonesw 2022). Eksploitasi dan perampasan hak-hak mereka dalam mendirikan pemerintahan sendiri bahkan mendorong kaum perempuan dalam membentuk persekutuan tentara di bawah kepemimpinan *Queen Hangbe* yang sering disebut dengan “*Amazon*”, tentara wanita Dahomey yang tak kenal takut (Jones 2022). Ini menjadi bukti bagaimana masyarakat Dahomey mengalami eksploitasi selama era penjajahan, masyarakat sering terpinggirkan dari proses ekonomi yang menguntungkan bahkan struktur negara mereka dirancang untuk kepentingan kolonial yang pada akhirnya menimbulkan pemberontakan (Hicks 2020).

Pemberontakan Dahomey mencakup konflik dengan kerajaan-kerajaan tetangga dan pihak kolonial untuk kembali menguasai wilayah pesisir mereka yang dulunya sangat memberikan kejayaan bagi Dahomey. Pemberontakan ini memberikan perubahan yang cukup signifikan dimana hasilnya mulai terjadi pada akhir tahun 1870-an ketika kerajaan menyetujui pengakuan Prancis atas kota Cotonou sebagai protektorat (Jones 2022). Hingga pada naik tahtanya Raja Behanzin pada tahun 1889 yang tegas menolak intervensi Eropa dan memerintahkan penyerbuan budak serta tindakan permusuhan lainnya terhadap protektorat Prancis yang memicu Perang Prancis-Dahomey Kedua pada tahun 1892 hingga 1894, serangan laut dan serangan darat dilancarkan terutama di wilayah pesisir untuk mengakuisisi kembali ladang dagang mereka (McGonnell dan Collins 2021).

Hingga akhirnya di tahun 1960, Dahomey memperoleh kemerdekaan yang diberikan oleh Prancis yang disebut dengan dekolonisasi dan berganti nama menjadi Benin pada 1975. Namun, kemerdekaan ini tidak menandai akhir perjuangan rakyat yang harus menghadapi kepemimpinan otoriter pada 1972 dipimpin oleh Mayor Mathieu Kerekou yang mendirikan rezim militer dengan ideologi Marxis-Leninis. Sehingga identitas poskolonial di Benin ditandai dengan kemiskinan, hubungan sex dengan kelas, rasisme terhadap ras kulit putih persis seperti yang digambarkan oleh Frantz Fanon dalam “*Black Skin, White Mask*” (Fanon 2007).

Proses transisi pascakolonial di Benin akhirnya mencapai titik sedikit memuaskan pada tahun 1994 yang akhirnya Benin berhasil menuju pemerintahan demokratis dengan pemilihan umum sebagai norma baru. Transisi kemerdekaan dan rasisme yang mereka dapatkan menjadi tekanan sehingga mendorong individu dan kelompok mencari cara bertahan hidup dan mempertahankan martabat mereka. Terutama dengan label sebagai penguasa pesisir dan perdagangan laut menciptakan pemikiran akan hak baru bagi mereka untuk melakukan perompakan. Yang mana, perompakan ini lahir sebagai manifestasi dari perlawanan terhadap marginalisasi yang masih tersisa dari era pasca kolonial dan sebagai upaya mengatasi warisan dekolonisasi yang cacat.

Marginalisasi di Benin terjadi ketika masyarakat lokal tidak diberikan kesempatan yang setara dalam proses keputusan dan pengambilan keputusan di kancah global. Ketergantungan pada ekspor dan kegagalan pemulihan perdagangan di era Dahomey akibat penyiksaan dan perbudakan berat yang mereka hadapi sepanjang penjajahan Prancis membuat kurang berkembangnya industrialisasi yang membuat ekonomi Benin rentan terhadap fluktuasi pasar internasional (Hicks 2020). Ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang diwariskan dari era kolonial terus berlanjut, dan hingga saat ini Benin masih terus dianggap sebagai negara *subaltern* yang dikemukakan oleh Spivak (Morris 2010).

### **Perompakan Eksentrik Pasca Marginalisasi**

Hambatan menghantui, Benin masih dianggap tidak mampu bersanding dan bersaing dengan negara kolonial yang jauh lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan negara penjajah. Dengan demikian, transisi pascakolonial di Benin melibatkan perubahan sistem kolonial yang represif menuju sistem negara demokrasi. Pembangunan pengembalian budaya identitas yang lebih inklusif untuk menghentikan dominasi kolonialisme ternyata sulit dicapai. Bayang-bayang perbudakan dan kondisi perdagangan pesisir yang tak lagi berjaya dan sudah tertinggal serta dorongan peperangan terdahulu yang membuat hilangnya sekutu dagang, membuat masyarakat hilang arah dalam memulai pengembalian identitas mereka di era Dahomey.

Upaya mempertahankan identitas dan usaha masyarakat Benin untuk mengembalikan masa kejayaannya berujung pada tombak kemiskinan dan marginalisasi ekonomi global. Kondisi mental, politik dan pengelolaan sumber daya tidak mencapai kemerdekaan, tidak ada komando yang berhasil menyelamatkan masyarakat Benin dari kemiskinan dan ketertinggalan. Sehingga membuat tekanan baru bagi masyarakat untuk mencapai pengakuan dengan cara yang ilegal, seperti melakukan perompakan dan penjarah di kawasan perairan Benin yang menjadi salah satu lintasan laut tersibuk di dunia.

Perompakan di Benin sejak dahulu selalu dianggap sebagai bentuk *blue crime* dengan standar kriminalitas biasa. Namun, jika menimbang dari transisi kolonialisme hingga kemerdekaan dan dampak marginalisasi dekolonisasi yang mereka terima, perompakan Benin bukan lah bentuk kriminalitas *blue crime* biasa, namun dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan ekonomi maritim dan ketidakadilan global. Lokasi strategis Benin di wilayah Teluk Guinea yang merupakan jalur perdagangan maritim terpenting di kawasan Afrika Barat, dan Pelabuhan Cotonou sebagai kunci kejayaan Kerajaan Dahomey dahulunya dalam melakukan transaksi perdagangan dengan Eropa (Teixeria dan Pinto 2022) memainkan peran utama dalam perompakan yang terjadi di perairan Benin sendiri.

Kapal yang melintasi perairan Benin merupakan kapal angkut muatan berat, seperti *Evergreen* dan kapal pengangkut minyak (International Chamber of Commerce 2012). Namun, penjarahan yang dilakukan perompak di Benin ini tergolong skala kecil dibandingkan dengan perompakan di kawasan Teluk Guinea lainnya untuk target kapal yang tergolong besar. Hal yang menarik dari kegiatan perompakan di Benin sendiri adalah penculikan awak kapal. Dan uniknya, kelompok perompak ini tidak membuat awak kapal yang diculik sebagai sandera politik ataupun untuk mendapatkan keuntungan ekonomi lebih lanjut. Justru, perompakan ini dilihat sebagai bentuk protes yang unik terhadap eksploitasi yang mereka dapatkan dan sebagai politik balas dendam yang empuk.

Seperti perompakan yang terjadi atas kapal *Anema E Core* milik Rizzo Bottiglieri De Carini, Italia tahun 2011 dan kapal ekspedisi *M.V Bonita* milik perusahaan J.J Ugland Norwegia tahun 2019 serta kapal *MSC Mandy* milik Rusia tahun 2019 yang seluruhnya memiliki kesamaan, yaitu penculikan awak kapal berkulit putih (*Pirates Kidnap Nine From Norwegian Ship off Benin* 2019). Maka secara implisit, perompakan di Benin merupakan bentuk perlawanan simbolik untuk membalaskan eksploitasi dan marginalisasi yang mereka dapatkan dari sisa kolonial.

Dengan menargetkan kapal-kapal dagang Eropa dan menculik awak kapal berkulit putih, perompak secara simbolis melawan kekuatan ekonomi global yang mereka anggap seharusnya bertanggung jawab atas marginalisasi yang mereka hadapi. Perompakan dan penculikan di kawasan perairan Benin adalah cara mereka menarik perhatian terhadap kondisi sosial dan memuaskan kekesalan ekonomi yang tidak adil. Tindakan ini sesuai dengan pendapat Frantz Fanon yang menyatakan kekerasan adalah alat untuk pembalasan dekolonisasi (Fanon 1963). Dengan melakukan perompakan sebagai representasi kekerasan, perompak Benin ingin memulihkan martabat dan identitas orang-orang yang terjajah untuk membongkar struktur dekolonisasi yang opresif.

### **Representasi Media yang Destruktif**

Representasi media dan diskursus internasional terhadap perompakan Benin seringkali memiliki kekurangan atau kecacatan yang mendistorsi pemahaman publik tentang fenomena ini. Perompakan memang suatu tindakan kriminalitas *blue crime* yang ilegal dan berbahaya. Dianggap sebagai kejahatan oleh norma internasional dan tindakan radikal oleh kelompok terpinggirkan untuk menantang ketidakadilan struktural. Stereotipisasi yang dilakukan media internasional dalam menggambarkan perompakan sebagai kriminalitas yang murni jahat tanpa memperhatikan konteks sosial, ekonomi dan politik yang melatarbelakangi tindakan mereka, cenderung menghasilkan karakterisasi simplifikasi negatif yang mengabaikan kompleksitas masalah (Eley dan Oyeleye 2021).

Representasi media yang cenderung menyederhanakan narasi perompakan terutama kasus yang terjadi di Benin menjadi “kisah penjahat versus korban” tanpa mengeksplorasi faktor-faktor struktural seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, eksploitasi, sejarah dan marginalisasi yang mendorong terjadinya perompakan. Liputan dan orientasi berita yang dilakukan oleh media internasional cenderung narasi tunggal. Fokus masalah akan berorientasi sebatas kekerasan dan dramatisasi perompakan, seperti pembajakan kapal, penyanderaan dan jumlah kerugian yang diakibatkan, daripada berorientasi latar belakang dan akar masalah. Media internasional jarang membahas dan meliput kondisi kehidupan para perompak dan komunitas asal mereka yang seringkali menderita akibat kemiskinan ekstrim, dan cenderung menutupi eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan dampak ekonomi global yang berkontribusi pada situasi pemicu perompakan. Bias Barat terkait diskursus global juga sering mendominasi. Sehingga kecenderungan melihat perompak sebagai ancaman terhadap perdagangan internasional dan kepentingan ekonomi mereka, tanpa memperhatikan perspektif dan kondisi negara-negara terpapar dampak keserakahan mereka.

Marginalisasi suara lokal yang terkena dampak langsung perompakan seringkali diabaikan, namun jika menyangkut konsorsium narasi akan berubah bias dan menyalahkan perompak dimana kondisi ini tidak seimbang dan masih bersifat imperialisme yang destruktif (Eley dan Oyeleye 2021). Diskursus global juga sering berfokus pada solusi militer dan keamanan, seperti penelitian terdahulu yang hanya terbatas membahas upaya militerisasi serta penegakan hukum yang berorientasi pada penangkapan dan penuntutan perompak tanpa upaya yang seimbang untuk memahami dan mengatasi penyebab dasar perompakan. Akibat bias yang ditimbulkan kecacatan representasi media dan diskursus global ini menciptakan stigma dan persepsi yang salah terhadap perompak. Kecacatan representasi ini menghalangi pengembangan dan implementasi solusi holistik dengan pendekatan terpadu yang melibatkan pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendidikan dan reformasi tata kelola jarang mendapatkan perhatian yang cukup, sehingga memberikan solusi destruktif berupa pengambilan kebijakan yang salah.

Seperti di Benin sendiri, fokus penanggulangan berlebihan pada solusi militer (Gouchola dan Benin Army 2013), tanpa memperhatikan pembangunan ekonomi lokal tentu saja memperburuk akar masalah yang seharusnya berorientasi pada pengembangan sumber daya ekonomi untuk mengatasi marginalisasi dan pemulihan budaya akibat dekolonisasi di masyarakat. Negara-negara donor dan lembaga internasional juga kurang tertarik untuk mendanai program-program yang berfokus pada penanganan akar permasalahan terkait perompakan jika masalah ini hanya dilihat melalui lensa keamanan dan kejahatan terhadap perdamaian. Sikap dan penanggulangan masalah yang ditentukan sejauh terlalu berfokus pada kulit masalah, bukan inti masalah. Sehingga semua indikasi kecacatan representasi media, diskursus, konsorsium, dan negara donor berimplikasi erat terkait masalah perompakan Benin sebagai bentuk perlawanan atas marginalisasi dan dekolonisasi yang mereka hadapi.

## **Kesimpulan**

Misteri perompakan di perairan Benin dapat dilihat sebagai perlawanan terhadap dampak marginalisasi dan dekolonisasi yang dialami oleh negara-negara Afrika. Warisan kolonial yang meninggalkan struktur ekonomi dan sosial yang eksploitatif telah berkontribusi pada kondisi ketidakadilan yang mendorong individu-individu di Benin untuk terlibat dalam aktivitas perompakan sebagai upaya bertahan hidup dalam bentuk protes. Marginalisasi ekonomi dan sosial yang dialami oleh banyak masyarakat pesisir Benin, diperparah oleh ketidakstabilan politik dan ketergantungan ekonomi pada kekuatan asing, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif sehingga menimbulkan perompakan. Ketidakmampuan

pemerintah lokal untuk menyediakan peluang ekonomi yang adil dan inklusif memperburuk situasi, memaksa banyak orang untuk bertahan hidup melalui cara yang ilegal.

Dekolonisasi yang dimulai pada abad ke-19 telah membawa konsekuensi marginalisasi terhadap budaya dan identitas Afrika. Perompakan di perairan Benin dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi dan penjajahan budaya yang dilakukan oleh negara-negara Eropa. Perompakan ini dapat dilihat sebagai upaya mempertahankan budaya dan identitas Afrika yang terancam oleh proses dekolonisasi. Oleh karena itu perompakan di perairan Benin dapat dilihat sebagai resistensi terhadap budaya dan politik dari dekolonisasi yang mereka hadapi pascakolonial. Diskursus global dan representasi media tentang perompakan di Benin seringkali bias dan menyederhanakan masalah, dan berakhir menggambarkan perompak sebagai penjahat tanpa mengakui konteks yang lebih luas. Fokus yang berlebihan pada solusi militer dan keamanan mengabaikan kebutuhan akan pendekatan yang lebih holistik, yang mencakup pemberdayaan pendidikan, ekonomi dan reformasi budaya. Untuk mengatasi masalah perompakan di perairan Benin secara efektif, penting untuk memperbaiki representasi media dan diskursus global yang menggiring opini masyarakat global, serta mengembangkan upaya yang mengatasi akar permasalahan. Upaya ini berorientasi pada pendekatan yang mengatasi akar penyebab marginalisasi dan mewujudkan dekolonisasi yang sejati, dimana masyarakat lokal bekas kolonisasi bebas dan berhak atas sumberdaya yang mereka miliki secara adil.

## Referensi

### Buku

- Bueger, C., dan Edmunds, T. 2024. *UNDERSTANDING MARITIME SECURITY*. E-CONTENT GENERIC VENDOR. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197767146.001.0001>
- Creswell, J. W., dan J. D. Creswell, 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: SAGE Publications.
- Fanon, F. 1963. *The wretched of the earth*. New York: Grove Press.
- Fanon, F. 2007. *Black Skin, White Masks* (R. Philcox, Trans.). New York: Grove Press.
- Hicks, D. 2020. *The British Museums: The Benin Bronzes, Colonial Violence and Cultural Restitution* (Pluto Press, Ed.). London: Pluto Press.
- Morris, R. C. (Ed.). 2010. *Can the Subaltern Speak? Reflections on the History of an Idea*. New York: Columbia University Press.
- wa Thiong'o, N. 1986. *Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature*. New York: Boydell dan Brewer, Limited.

### Artikel Jurnal

- Boamah, F. 2023. "The Role of the UN Security Council in the Fight Against Piracy in the Gulf of Guinea", *17(3):66-89*.
- Houekpoheha, M. A., Kounouhewa, B. B., Hounsou, J. T., Tokpohozin, B. N., Houguevou, J. V., dan Awanou, C. N. 2015. "Variations of wave energy power in shoaling zone of Benin coastal zone", *International Journal of Renewable Energy Development*, *4(1):64-71*.

### Laporan Penelitian

- Gouchola, L. C. S. L., dan Benin Army, 2013. *Strategic Implications of Piracy in Benin's Territorial Waters*. <apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA589324.pdf>

### Dokumen Resmi

- IMB issues piracy warning for Benin, 2012. London: ICC Commercial Crime Services. [icc-ccs.org/icc\\_2527/index.php/297-imb-issues-piracy-warning-for-benin](http://icc-ccs.org/icc_2527/index.php/297-imb-issues-piracy-warning-for-benin)



Report of the United Nations assessment mission on piracy in the Gulf of Guinea, 2012. New York: United Nations Security Council.

### **Publikasi Daring**

Adotevi, S. S., Law, R., dan The Editor of Encyclopaedia Britannica, 2024. "Benin - Decolonization, Independence, Revolution." [Online]. Dalam <http://britannica.com/place/Benin/Decolonization-and-independence> [diakses pada 24 Juni 2024]

BBC, 2019. "Pirates kidnap nine from Norwegian ship off Benin." [Online]. Dalam <http://bbc.com/news/world-africa-50287013> [diakses pada 24 Juni 2024]

Colombant, N., 2012. "Serangan Bajak Laut Meningkatkan di Lepas Pantai Afrika Barat." [Online]. Dalam <http://voaindonesia.com/a/serangan-perompak-meningkat-di-lepas-pantai-afrika-barat-136509133/102865.html> [diakses pada 24 Juni 2024]

Council on Foreign Relations, 2023. "How Did Decolonization Reshape the World? CFR Education Global Matters." [Online]. Dalam <http://education.cfr.org/learn/reading/how-did-decolonization-reshape-world> [diakses pada 24 Juni 2024]

Eley, C., dan Oyeleye, D., 2021. "Decolonizing the Mind. Consortium of Humanities Centers and Institutes." [Online]. Dalam <http://chcnetwork.org/ideas/decolonizing-the-mind> [diakses pada 24 Juni 2024].

*Gulf of Guinea Piracy – CEMLAWS Africa*, 2021. CEMLAWS Africa. [Online]. Dalam <https://cemlawsafrica.org/gulf-of-guinea-piracy/> [diakses pada 10 November 2024]

Jones, R. 2022. *The true story of the women warriors of Dahomey*. National Geographic. [Online] Dalam <https://www.nationalgeographic.com/history/article/the-true-story-of-the-women-warriors-of-dahomey> [diakses pada 10 November 2024]

McGonnell, S., dan T. Collins, 2021. "The Benin Bronzes: A Violent History." [Online]

Dalam <http://thecollector.com/benin-bronzes-restitution-controversy-nigeria/> [diakses pada 24 Juni 2024]